

## PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

Muhamad Aditia Nugraha<sup>1</sup>, Virna Tria Amanda<sup>2</sup>, Rizky AkhmadZidane<sup>3</sup>, Lilis Karwati<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi  
email: nugrahaaditia251@gmail.com

<sup>2</sup>Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi  
email: virnatriaamanda@gmail.com

<sup>3</sup>Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi  
email: rizkyakhmadzidane1234@gmail.com

<sup>4</sup>Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi  
email: liliskarwati@unsil.ac.id

**Abstract.** *This study examines the important roles of the government and society in managing life skills education programs in Indonesia. The objective of the research is to understand the collaboration between both parties in enhancing the effectiveness of these programs. The method employed is a literature study approach, collecting and analyzing various sources of information. The findings indicate that government support in terms of policies, funding and resources, oversight, and evaluation is crucial, while the role of society in participation and cooperation enhances relevance and sustainability. These findings suggest that the synergy between the government and society is key to achieving sustainable and effective life skills education objectives. This study recommends improving communication and collaboration between both parties to optimize program outcomes.*

**Keywords:** *Life skill education, Role of government, Role of community*

### I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses yang terorganisir yang memungkinkan transfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dari satu generasi ke generasi lainnya (Ahmad, A., dkk. 2023). Tujuan pendidikan meliputi pengembangan individu secara komprehensif, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan kehidupan, serta membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Tujuan pendidikan menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pada Bab II pasal 3, adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mereka menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, berilmu, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selain itu, dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pasal 13 ayat 1, dinyatakan bahwa jalur pendidikan mencakup

pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan suatu bangsa dan negara. Salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Hal itu sejalan dengan pernyataan menurut (Syaadah, R et al, 2023) bahwa Pendidikan formal adalah pendidikan yang diorganisir secara sistematis, memiliki tingkat atau jenjang, dan berlangsung dalam periode waktu tertentu, mulai dari sekolah dasar

hingga universitas. Selain mencakup program pendidikan akademis umum, pendidikan formal juga mencakup berbagai program khusus serta lembaga yang digunakan untuk pelatihan teknis dan profesional. Pendidikan nonformal adalah bentuk pendidikan yang menawarkan layanan berkualitas dengan penguatan pengetahuan dan keterampilan, baik secara kurikuler maupun ekstrakurikuler, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Beberapa bentuk dari program dan lembaga pendidikan non formal seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Homeschooling, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Ahmad, A et al, 2023). Adapun pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. No. 20 Tahun 2003. Bab I pasal 1 ayat 13 bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan nonformal yang berperan penting terhadap kemampuan peserta didik dalam belajar dan hidup mandiri. Kecakapan hidup dapat diartikan sebagai keterampilan atau kemampuan untuk beradaptasi, berperilaku positif, serta menggali potensi peserta didik untuk dikembangkan dan diamankan. Dengan demikian, peserta didik memiliki keberanian untuk menghadapi masalah dan memecahkan permasalahan tersebut secara kreatif (Salsabila, WT et al, 2021). Selain itu (Ifnaldi, 2021) mengatakan bahwa pendidikan kecakapan hidup adalah jenis pendidikan yang memberikan dasar dan pelatihan yang tepat kepada peserta didik mengenai nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat menjadi individu yang mampu, terampil, dan siap menghadapi kehidupan. Tujuannya adalah agar mereka dapat menjaga keberlangsungan hidup dan perkembangan diri. Dengan pendekatan ini, pendidikan menjadi lebih realistis dan kontekstual, serta tidak menjauhkan peserta didik dari asal-usul mereka, sehingga pendidikan tersebut akan lebih bermakna dan berkembang dengan baik.

Pesalan pendidikan pada dasarnya berkaitan langsung dengan kehidupan manusia dan mengalami perubahan serta perkembangan seiring dengan kehidupan itu sendiri, baik dari segi teori maupun konsep operasionalnya.

Menurut (Desmawati Lilirk, 2020) meskipun tuntutan standar kompetensi lulusan pendidikan formal dan non-formal sama, pengelolaan pendidikan kesetaraan lebih menekankan pada konsep-konsep terapan, tematik, induktif, dan kontekstual, serta pelatihan kecakapan hidup yang berorientasi pada kerja atau usaha mandiri; oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kesetaraan, serta mewujudkan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan, adalah melalui pengembangan kurikulum.

Pemerintah, sebagai pengelola utama pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program ini. Tanggung jawab tersebut mencakup pengembangan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelatihan untuk pendidik. Di sisi lain, masyarakat juga memegang peranan penting dalam mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pendidikan kecakapan hidup, baik melalui dukungan moral maupun sumber daya yang ada. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, program pendidikan kecakapan hidup dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat menghasilkan individu yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan sosial dan emosional yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dibuatnya jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kedua pihak dalam pengelolaan program pendidikan kecakapan hidup serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pengertian Pendidikan Kecakapan Hidup**

Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mengajarkan keterampilan praktis seperti

mengelola keuangan, memecahkan konflik, dan menghadapi situasi di dunia kerja. Dengan kata lain, pendidikan kecakapan hidup bertujuan untuk membantu seseorang menjadi lebih siap, tangguh, dan mandiri dalam menjalani kehidupan.

Menurut Depdiknas (2002) kecakapan hidup (*life skill*) merupakan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. Selanjutnya, orang tersebut secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya.

Istilah Kecakapan Hidup (*life skills*) diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Dirjen PLSP, Direktorat Tenaga Teknis, 2003).

Menurut Slamet (2002) Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan yang memberi bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil dalam menjalankan kehidupannya yaitu dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. Dengan cara ini, pendidikan akan lebih realistis, lebih kontekstual, tidak akan mencabut peserta didik dari akarnya, sehingga pendidikan akan lebih bermakna bagi peserta didik dan akan tumbuh subur. Seseorang dikatakan memiliki kecakapan hidup apabila yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil dalam menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia. Kehidupan yang dimaksud meliputi kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan tetangga, kehidupan masyarakat, kehidupan perusahaan, kehidupan bangsa, dan kehidupan-kehidupan yang lainnya. Ciri kehidupan adalah perubahan, dan perubahan selalu menuntut kecakapan-kecakapan untuk menghadapinya.

## 2.2. Jenis-Jenis Pendidikan Kecakapan Hidup

Menurut umam, A. K. (2018). jenis kecakapan hidup, terdapat beberapa hal, yaitu:

- A. Kecakapan mengenali diri (*self awareness*); kemampuan personal: kemampuan penghayatan di sebagai makhluk Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yaitu keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai homo divinus (makhluk yang berketuhanan), dengan fitrah manusia untuk beragama.
- B. Kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*): kecakapan menggali dan menemukan informasi, mengolah informasi dan mengambil keputusan, memecahkan masalah secara kreatif.
- C. Kecakapan sosial atau kecakapan antar personal yaitu meliputi kemampuan komunikasi empati dan kecakapan bekerjasama.
- D. Kecakapan akademik. Kecakapan ini merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir rasional yang bersifat umum. Kecakapan vokasional yaitu kecakapan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat

## 2.3. Peran Masyarakat dalam Pendidikan Kecakapan Hidup

- A. Partisipasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan

Menurut (Setyorini, W. 2017) Masyarakat terlibat dalam setiap tahap pendidikan kecakapan hidup, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Keterlibatan ini memastikan bahwa program yang disusun sesuai dengan kebutuhan, minat, dan sumber daya yang tersedia di komunitas. Hal ini juga membantu meningkatkan relevansi pendidikan terhadap konteks lokal.

- B. Pemberdayaan Melalui Pelatihan

Yunus, D. L. (2020) Program pendidikan kecakapan hidup dirancang untuk membekali

masyarakat dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya, pelatihan dalam bidang kewirausahaan, pertanian, atau keterampilan teknis lainnya dapat membantu individu untuk mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

C. Membangun Kesadaran dan Kemandirian

Sari, R., & Rahmawati, A. (2021). Pendidikan kecakapan hidup tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kesadaran akan hak dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Dengan memahami peran mereka, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

## 2.4. Peran Pemerintah dalam Pendidikan Kecakapan Hidup

A. Perumusan Kebijakan

Gufron, S. (2020). Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang mendukung pengembangan kecakapan hidup. Kebijakan ini mencakup pengintegrasian pendidikan kecakapan hidup ke dalam kurikulum nasional, yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari dan dunia kerja.

B. Penyediaan Sumber Daya

Pemerintah menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup, termasuk pelatihan bagi guru, pengembangan materi ajar, serta fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini penting agar pendidikan kecakapan hidup dapat diimplementasikan secara efektif di berbagai tingkat pendidikan.

C. Program Pelatihan Dan Pengembangan

Pemerintah juga menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan praktis. Program ini sering kali dilakukan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga pendidikan non-formal lainnya yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan keterampilan yang relevan.

## III. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan pendekatan studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan program pendidikan kecakapan hidup. Menurut (Perdana, M & Suswandari, M, 2021) studi pustaka adalah proses penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sejenis, artikel, catatan, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan, serta mengkaji konsep dan teori yang ada dalam literatur, termasuk artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. PERAN PEMERINTAH

#### A. Kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup

Kebijakan dalam pendidikan mengenai pendidikan kecakapan hidup bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional Indonesia. Tujuan tersebut adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Menurut (Syafiq, AR, 2016) dalam melaksanakan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup, fokus utama kegiatan pendidikan harus ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki keterampilan yang diperlukan untuk

menjalani kehidupan. Pendidikan formal yang bertujuan mengembangkan kemampuan life skills perlu dirancang ulang secara sistematis ke dalam kurikulum sekolah. Oleh karena itu, pengorganisasian mata pelajaran secara bertahap juga perlu mengacu pada bidang-bidang life skills yang telah diuraikan sebelumnya, dengan porsi alokasi waktu yang seimbang dan proporsional sesuai dengan jenjang pendidikan dan jenis sekolah.

Dalam (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2006 hlm 2-4) mengatakan bahwa Kebijakan yang mengintegrasikan program pendidikan kecakapan hidup dalam Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) didasarkan pada kenyataan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dapat direfleksikan dalam kehidupan peserta didik. Sekolah, sebagai tempat pelaksanaan program pendidikan, merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, program pendidikan kecakapan hidup di sekolah perlu memberikan wawasan yang luas kepada peserta didik mengenai keterampilan tertentu yang relevan dengan pengalaman sehari-hari mereka di lingkungan.

Pendidikan kecakapan hidup sudah menjadi suatu kebijakan seiring dengan berlakunya Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan. Standar Isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dirumuskan dalam kriteria terkait kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, serta silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Dokumen Standar Isi meliputi: (1) kerangka dasar kurikulum, (2) struktur kurikulum, (3) standar kompetensi dan kompetensi dasar, (4) beban belajar, dan (5) kalender pendidikan.

Kebijakan pendidikan kecakapan hidup memainkan peran penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan yang terus berubah di dunia. Dengan mengintegrasikan keterampilan hidup ke dalam kurikulum, pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis, tetapi

juga pada pengembangan keterampilan praktis dan sosial.

Pendekatan yang sistematis diharapkan dapat menciptakan individu yang mandiri, kreatif, dan adaptif. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi elemen kunci dalam mendukung pembelajaran kecakapan hidup. Dengan penerapan kebijakan ini, diharapkan kualitas pendidikan meningkat dan sumber daya manusia yang terampil siap menghadapi tantangan global. Penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat.

## **B. Pendanaan dan Sumber Daya Pendidikan Kecakapan Hidup**

Pendanaan untuk pendidikan kecakapan hidup berkaitan dengan pengalokasian sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu dalam menghadapi tantangan sehari-hari (World Bank, 2020). Beberapa aspek penting dalam pendanaan pendidikan kecakapan hidup meliputi sumber pendanaan, evaluasi dan akuntabilitas, serta kolaborasi.

Sumber pendanaan pendidikan kecakapan hidup berasal dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, lembaga swasta, organisasi internasional, dan komunitas. Penggunaan dana tersebut mencakup pengembangan kurikulum, pelatihan instruktur, peningkatan atau pengembangan fasilitas dan sarana, serta penyelenggaraan program beasiswa.

Evaluasi dan akuntabilitas terhadap penggunaan dana serta dampak program pendidikan dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya (Gracia, 2021).

Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas sangat penting dalam menciptakan program yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Wilson, 2020).

Pengelolaan dana pemerintah untuk pendidikan kecakapan hidup di Indonesia melibatkan serangkaian langkah strategis, yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi, untuk memastikan

penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

1) Perencanaan

Dalam (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020) menyatakan bahwa perencanaan adalah tahap awal dalam pengelolaan dana. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyusun rencana strategis yang mencakup Pengembangan pendidikan keterampilan hidup sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Rencana ini melibatkan pengumpulan data dan analisis untuk menentukan prioritas program yang harus didanai.

2) Penganggaran

Setelah perencanaan, proses penganggaran dilakukan. Pemerintah mengalokasikan dana untuk pendidikan kecakapan hidup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% dari APBN untuk sektor pendidikan (Republik Indonesia, 2003).

3) Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, dana yang telah disediakan digunakan untuk melaksanakan program pendidikan keterampilan hidup. Ini mencakup pelatihan bagi masyarakat, pengembangan kurikulum, dan peningkatan sarana pendidikan (Puspitasari (2021). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai rencana.

4) Evaluasi

Evaluasi adalah komponen penting dalam pengelolaan pendanaan. Pemerintah melaksanakan evaluasi secara rutin untuk menilai sejauh mana dana digunakan secara efektif dan dampak yang dihasilkan dari program pendidikan keterampilan hidup. Menurut (Ismail, 2020) proses ini melibatkan pengumpulan data dan umpan balik dari peserta didik

dan penyelenggara program. asil evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program di masa mendatang.

5) Akuntabilitas

Pemerintah juga menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Ini meliputi transparansi dalam penggunaan dana serta pelaporan kepada publik mengenai hasil dan pencapaian dari program yang dijalankan (Halim, 2019). Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan dana pendidikan. Pemerintah memiliki peran yang sangat Penting dalam menyediakan sumber daya untuk pendidikan kecakapan hidup di Indonesia, terutama dalam konteks pendidikan nonformal. Melalui kebijakan dan regulasi, pemerintah menetapkan standar yang harus diikuti dalam pengembangan kurikulum dan pelatihan instruktur untuk pendidikan nonformal, yang sering kali lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal (Republik Indonesia, 2003).Alokasi anggaran dari APBN menjadi sumber utama pendanaan, yang digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk program pelatihan nonformal yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan praktis masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan pelatihan bagi instruktur pendidikan nonformal agar mereka memiliki kompetensi yang relevan (Ismail, 2020). Dalam rangka mendukung aksesibilitas, pemerintah menawarkan program beasiswa dan dukungan finansial bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, sehingga pendidikan nonformal dapat diakses oleh lebih banyak orang (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Monitoring dan evaluasi program dilakukan untuk menilai efektivitasnya, sementara pemerintah mendorong kerjasama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan program nonformal yang berkualitas (Prabowo, 2020).

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya mempersiapkan

individu agar siap menghadapi tantangan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari, menjadikan pendidikan nonformal sebagai salah satu solusi penting dalam pengembangan sumber daya manusia.

### **C. Evaluasi dan Pengawasan Pendidikan Kecakapan Hidup**

Evaluasi pendidikan kecakapan hidup proses krusial untuk menilai efektivitas program dan dampaknya pada peserta didik. Proses ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penilaian kurikulum hingga pengumpulan umpan balik dari peserta.

Pertama, Evaluasi dimulai dengan menilai relevansi dan efektivitas kurikulum pendidikan keterampilan hidup, termasuk analisis apakah materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan masyarakat. (Bafadal, 2018). Selanjutnya, Kualitas pengajaran memiliki dampak signifikan terhadap hasil belajar, sehingga evaluasi kinerja instruktur dilakukan melalui observasi di kelas, umpan balik dari peserta didik, serta penilaian terhadap metode pengajaran yang diterapkan. (Ismail, 2020). Selain itu, pengumpulan umpan balik dari peserta didik merupakan bagian penting dalam evaluasi. Hal ini dilakukan melalui survei dan wawancara untuk memahami pengalaman mereka dalam program, termasuk tantangan yang dihadapi dan manfaat yang diperoleh (Puspitasari, 2021). Evaluasi juga melibatkan pengukuran hasil belajar, yang dapat dilakukan melalui ujian, proyek, atau penilaian keterampilan praktis. Hasil dari pengukuran ini digunakan untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Analisis dampak jangka panjang dari pendidikan keterampilan hidup juga penting, termasuk sejauh mana peserta didik dapat menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia kerja. Proses evaluasi ini berkontribusi pada penilaian keberhasilan program secara keseluruhan.

Evaluasi yang dilaksanakan pemerintah terhadap pendidikan kecakapan hidup di Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas dan relevansi program tersebut. Pemerintah secara

berkala melakukan penilaian terhadap program ini untuk mengukur sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Proses evaluasi ini melibatkan berbagai aspek, termasuk kurikulum, metode pengajaran, dan sarana yang tersedia. Selain itu, pemerintah juga mengumpulkan informasi melalui survei dan penelitian untuk mengetahui dampak pendidikan kecakapan hidup pada peserta didik. Data yang dikumpulkan mencakup tingkat keterampilan yang diperoleh, kemampuan peserta dalam menerapkan keterampilan tersebut, serta dampak sosial-ekonomi yang dirasakan (Ismail, 2020).

Mendapatkan umpan balik dari peserta didik merupakan bagian integral dari evaluasi ini. Pemerintah melakukan wawancara dan survei untuk memahami pengalaman peserta didik, tantangan yang mereka hadapi, dan manfaat yang dirasakan dari program pendidikan. Selain itu, evaluasi juga meliputi penilaian kinerja para instruktur yang mengajar pendidikan keterampilan hidup. Pemerintah mengawasi metode pengajaran yang digunakan dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan mutu pengajaran.

Analisis dampak jangka panjang juga dilakukan untuk menilai sejauh mana peserta didik dapat menerapkan keterampilan yang telah mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia kerja setelah menyelesaikan program. (Prabowo, 2020). Hasil evaluasi ini digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi baru dalam pengembangan pendidikan keterampilan hidup. Dengan melaksanakan tindak lanjut dan perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah dapat memastikan bahwa pendidikan keterampilan hidup tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar kerja (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan keterampilan hidup, sehingga lebih efektif dalam mempersiapkan individu menghadapi tantangan di dunia nyata.

Pengawasan dalam pendidikan kecakapan hidup mencakup serangkaian

langkah untuk memastikan bahwa program pendidikan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pertama, pengawasan dilakukan secara rutin untuk memantau pelaksanaan program, yang mencakup pengecekan kurikulum, metode pengajaran, dan sumber daya yang digunakan. Selain itu, kualitas pengajaran sangat penting; oleh karena itu, pengawasan juga mencakup evaluasi kinerja instruktur melalui observasi di kelas, umpan balik dari peserta didik, dan penilaian terhadap metode pengajaran yang diterapkan.

Menurut (Magfiroh, I & Arifin, Z, 2019) dalam temuan penelitiannya terdapat proses pengawasan dalam pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup diantaranya yaitu penetapan standar, evaluasi dan tindakan perbaikan. Penetapan standar keberhasilan yang diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup diukur berdasarkan sejauh mana kegiatan yang dilakukan dapat berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Dalam evaluasi dapat melaporkan masalah atau kendala yang terjadi lalu dipecahkan secara musyawarah. Lalu yang terakhir adalah tindakan perbaikan, hal ini merupakan tahap selanjutnya dari evaluasi yang dimana melaporkan hasil permasalahan dalam evaluasi lalu memusyawarahkan permasalahan tersebut untuk dicari tau solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang dilaporkan.

## 2. PERAN MASYARAKAT

### A. Partisipasi

Menurut Dwiningrum, (2011) dalam Muna, A., & Muarifuddin, M. (2023). Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan kelompok masyarakat dalam melaksanakan dan pembangunan suatu program kegiatan yang dilaksanakan pada masyarakat.

Pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga pendidikan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan program ini berjalan efektif, relevan dengan

kebutuhan lokal, dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, masyarakat dapat berperan sebagai pendukung, penggerak, dan fasilitator dalam penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup.

Menurut Khaldun, R. (2016) Partisipasi seperti dalam organisasi kepemudaan misalnya, merupakan salah satu komponen partisipasi sosial masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan karena organisasi tersebut mitra potensial pemerintah dalam upaya mengurangi dan memecahkan masalah-masalah sosial. Sejalan dengan hal tersebut, organisasi lokal sebagai sumber daya potensial dituntut untuk berperan secara optimal untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan.

Dengan adanya partisipasi aktif, pendidikan kecakapan hidup dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ini tidak hanya meningkatkan relevansi program tetapi juga memperkuat kohesi sosial serta mempersiapkan individu agar lebih mandiri dan produktif dalam menghadapi tantangan kehidupan dan dunia kerja. Kerja sama ini menegaskan bahwa pendidikan kecakapan hidup hanya bisa berhasil jika dilaksanakan dengan semangat gotong royong antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat itu sendiri.

### B. Kerja Sama

Kecakapan kerjasama sangat diperlukan karena sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu bekerjasama dengan manusia lain. Kerjasama bukan sekedar "*kerja sama*" tetapi yang disertai dengan saling pengertian, saling menghargai dan saling membantu. Marwiyah, S. (2012).

Sebagaimana dalam Implementasi program pendidikan kecakapan hidup membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Kerja sama ini bertujuan agar pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga melatih keterampilan praktis yang relevan



dengan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan dunia kerja.

Membangun hubungan kerja sama merupakan membangun kepercayaan berarti membangun budaya, membangun budaya bukan hanya sekedar membangun adat, tradisi, dan kebiasaan akan tetapi membangun budaya berarti membangun kemampuan keterampilan dan membangun sikap, di mana apabila ketiga hal ini dijadikan dasar dalam membangun hubungan kerja sama, maka yakin dan percaya program pendidikan kecakapan hidup dalam pendidikan nonformal tersebut akan tetap eksis dan bisa bertahan dalam menjalan proses pendidikan kecakapan hidup (Miradj, S., & Sumarno, S. (2014).

Membangun hubungan kerjasama tidak selamanya harus dengan pemerintah semata, tetapi harus juga dengan lembaga lembaga swasta atau organisasi lain yang terpenting adalah bahwa lembaga lembaga tersebut memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun atau membentuk program pendidikan kecakapan hidup. Karena lembaga lembaga pendidikan nonformal tersebut hanya sebagai wadah untuk melatih dan mendidik masyarakat yang tidak memiliki skill atau kecakapan hidup.

Kerja sama sangat penting untuk kemajuan lembaga maupun organisasi dalam masyarakat, prinsip prinsip itu antara lain sebagai berikut:

- 1) Harus memiliki kesamaan visi misi, hubungan kerjasama hendaknya dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi dan tujuan organisasi. Kesamaan dalam visi dan misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan. Lembaga lembaga yang membangun hubungan kerjasama dapat bersinergi untuk mencapai tujuan demi kepentingan bersama.
- 2) Membangun kepercayaan (*trust*) harus ada rasa saling percaya antar pihak yang bermitra. Karena kepercayaan adalah modal yang paling mendasar dalam membangun hubungan kerja sama jejaring.
- 3) Saling menguntungkan, tujuan agar kerja sama dapat menguntungkan untuk belajar melalui praktik

langsung, seperti magang atau kegiatan sosial. Program pendidikan kecakapan hidup merupakan fondasi yang kuat dalam membangun Kemitraan.

- 4) Menjaga efisiensi dan efektivitas; dengan menjaga efisiensi tersebut, tentu saja tidak mengurangi kualitas proses dan hasil. Justru sebaliknya dapat meningkatkan kualitas proses dan produk yang dicapai. Tingkat efektifitas pencapaian tujuan menjadi lebih tinggi jika proses kerja kita melibatkan secara bersama sama.

### C. Peran Komunitas/Organisasi

Komunitas atau organisasi memiliki peran penting dalam mendukung dan memperkuat program pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*). Mereka bertindak sebagai jembatan antara institusi pendidikan, masyarakat, dan dunia kerja dengan menyediakan akses ke berbagai sumber daya, pelatihan, serta pengalaman praktis. Selain itu, komunitas ini membantu mengidentifikasi kebutuhan lokal dan menyesuaikan kurikulum agar lebih relevan dengan tantangan yang dihadapi peserta didik. Dengan demikian, organisasi seperti LSM, komunitas bisnis, dan institusi sosial dapat berkontribusi dalam mengembangkan keterampilan dasar maupun spesifik, seperti komunikasi, manajemen waktu, kewirausahaan, dan keterampilan teknis lainnya.

Partisipasi komunitas organisasi juga memberikan peserta didik kesempatan melibatkan komunitas cenderung lebih efektif karena mampu memberikan pembelajaran kontekstual, membangun jaringan sosial, dan memupuk rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Selain itu, mereka dapat berperan dalam memfasilitasi transisi peserta didik dari dunia pendidikan ke dunia kerja melalui bimbingan karir dan pelatihan vokasional. Secara keseluruhan, keterlibatan komunitas organisasi dalam program ini berfungsi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan setiap individu memiliki bekal keterampilan untuk menghadapi kehidupan dan perkembangan karier.

Pendidikan kecakapan hidup dalam konteks pendidikan nonformal memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Komunitas organisasi, seperti lembaga swadaya masyarakat, yayasan, dan kelompok masyarakat lokal, berkontribusi secara signifikan dalam implementasi program PKH. Pembahasan ini akan menguraikan beberapa aspek penting dari peran komunitas organisasi dalam program pendidikan kecakapan hidup di pendidikan nonformal.

Komunitas organisasi sering kali menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan program pendidikan. Mereka dapat menawarkan tempat pelatihan, alat bantu belajar, serta pengajar yang berpengalaman. Gufron, S., Ansar, A., & Haris, I. (2020), disebutkan bahwa dalam lembaga pendidikan nonformal di Gorontalo berhasil melaksanakan PKH dengan dukungan dari komunitas lokal yang menyediakan fasilitas dan instruktur terampil. Komunitas organisasi dalam program pendidikan kecakapan hidup di pendidikan nonformal sangat strategis dan multifaset. Dari penyediaan sumber daya hingga evaluasi program, keterlibatan mereka memastikan bahwa pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

### **3. DAMPAK PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP**

#### **A. Sosial dan Ekonomi**

Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup memberi peluang bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat menguasai keterampilan fungsional praktis yang dapat bermanfaat ketika bekerja baik disektor formal maupun informal sesuai dengan peluang kerja yang ada serta mendorong masyarakat untuk membuka usaha sendiri. Life skills merupakan salah satu fokus analisis dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang menekankan pada kecakapan hidup atau bekerja.

Sebagai tujuan, pendidikan kecakapan hidup menunjuk pada keadaan atau

hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial dan ekonomi.

- 1) Masyarakat yang berdaya Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang saat ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan mereka (Kartasasmita, G., 1997).
- 2) Memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kehidupan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.
- 3) Memiliki kepercayaan diri, ketika seseorang dapat menerima dan berdamai dengan dirinya, orang tersebut akan lebih mampu untuk mengembangkan & memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, sehingga akan mendorong untuk melakukan kegiatan positif (Dana, T. Eva, N. Andayani, S. 2022).
- 4) Mampu menyampaikan aspirasi, aspirasi adalah harapan untuk keberhasilan pada masa depan. Aspirasi berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang.
- 5) Mempunyai mata pencaharian.
- 6) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Partisipasi masyarakat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat bukanlah hal yang mudah dilakukan. Terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara kesejahteraan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi, kurangnya akses dan informasi, serta perbedaan kepentingan dan pandangan yang ada di dalam masyarakat (Riyanto, M. & Kovalenko, V. 2023).

- 7) Mandiri, dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
- 8) Bertanggung jawab dan kecakapan dalam berinteraksi dengan orang lain.

## B. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan konsep pendidikan kecakapan hidup, Kecakapan personal, mencakup kecakapan dalam memahami diri (*self awareness skill*) merupakan penghayatan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan Warga Negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. dan kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*) adalah kecakapan yang diperlukan dalam pengembangan potensi berfikir. Kecakapan ini mencakup antara lain kecakapan menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif.

Dampak dari seseorang yang memiliki kecakapan personal meliputi:

- 1) Peningkatan rasa percaya diri,
- 2) Berpikir rasional.
- 3) Memiliki konsep diri,
- 4) Mampu mengaktualisasikan dirinya.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern, program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) yang diintegrasikan dalam program pendidikan nonformal memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat. Berfokus pada pengembangan keterampilan hidup, program ini tidak hanya memperluas akses pendidikan masyarakat tetapi juga memberdayakan individu untuk menghadapi tantangan global. Program pendidikan kecakapan hidup memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan yang relevan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu, program ini memberdayakan ekonomi melalui

pelatihan keterampilan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Keberhasilan program PKH juga tercermin dalam peningkatan daya saing global masyarakat melalui fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan secara internasional. Secara keseluruhan, penekanan pada pendidikan kecakapan hidup menjadi solusi integral dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman, menyumbang pada pembangunan masyarakat yang lebih terdidik, terampil, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

### 5.2. Saran

Pendidikan kecakapan hidup di Indonesia perlu diperkuat dengan mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan kemajuan teknologi. Pemerintah diharapkan meningkatkan alokasi anggaran untuk pelatihan guru, pengembangan materi ajar yang berkualitas, dan perbaikan infrastruktur pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis juga sangat penting untuk menciptakan program yang tepat sasaran. Selain itu, evaluasi secara rutin dan transparan diperlukan untuk menilai efektivitas program tersebut. Pemberdayaan komunitas lokal akan membantu memastikan bahwa program pendidikan relevan dan berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Tiara Sari, A. J., Wardana, A. H., Rosyid, M. N. I., Widiyanto, E., & Rasyad, A. (2023). Tren Perkembangan Pendidikan Non- Formal . JP (Jurnal Pendidikan) : Teori Dan Praktik. 7(2). 76–82. <https://doi.org/10.26740/jp.v7n2.p76-82>.
- Bafadal, I. (2018). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kecakapan Hidup di Indonesia. Jurnal Pendidikan, 45(2), 123-134.
- Dana, T. Eva, N. Andayani, S. (2022). Kepercayaan Diri dan Kesejahteraan Psikoogis Anggota Organisasi Mahasiswa: Jurnal Psikologi Perseptual. 7(1). 28-45.

- Depdiknas, Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education), ( Jakarta: Tim Broad-Based Education, (2002).
- Desmawati, Liliek et al. (2020). Penerapan Model Pendidikan Kecakapan Hidup Pada Program Pendidikan Kesetaraan Di Kota Semarang. *Edukasi*. 14,(1). <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.968> .
- Ditjen PLS (2003). Program Life Skills Melalui Pendekatan Broad Based Education (BBE). Jakarta: Direktorat Tenaga Teknis Depdiknas
- Garcia, M. (2021). Collaboration for Sustainable Education. *International Journal of Education*, 12(2), 134-145
- Gufron, S. (2020). Implementasi Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Batudaa Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Normalita*, 3(1), 75-85.
- Gufron, S., Ansar, A., & Haris, I. (2020). Implementasi Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Batudaa Kabupaten Gorontalo. *Normalita (Jurnal Pendidikan)*, 8(1)
- Halim, M. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 14(2), 45-58. <https://doi.org/10.21831/sakp.v5i5.5316> .
- Ifnaldi. (2021). Pendidikan Kecakapan Hidup. *Dar El-Ilmi : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*. 8,(2). 170-188. <https://doi.org/10.52166/dareilmi.v8i2.2911>.
- Ismail, S. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Kecakapan Hidup di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 17(1), 99-110.
- Ismail, S. (2020). Pentingnya Pelatihan Instruktur dalam Pendidikan Kecakapan Hidup. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 12(3), 145-156.
- Kartasasmita, G. (1997). Pemnerdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. 1- 25.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Rencana Strategis Pendidikan Kecakapan Hidup 2020- 2024. Jakarta: Kemdikbud.
- Khaldun, R. (2016). Pemberdayaan (pemuda) karang taruna dalam meningkatkan dan menumbuhkan minat bisnis kreatif di Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 12(2), 168-185
- Magfiroh, I & Arifin, Z. (2019). Pendidikan kecakapan hidup dalam mewujudkan kemandirian warga binaan eks psikotik. *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan*. (1), 2.117-127. <https://doi.org/10.26555/jptp.v1i2.15133>.
- Marwiyah, S. (2012). Konsep pendidikan berbasis kecakapan hidup. *Jurnal Falasifa*, 3(1), 75-97.
- Miradj, S., & Sumarno, S. (2014). Pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses pendidikan nonformal, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Halmahera Barat. *JPPM (jurnal pendidikan dan pemberdayaan masyarakat)*, 1(1), 101-112.
- Mislaini, M. (2017). Pendidikan dan bimbingan kecakapan hidup (life skill) peserta didik. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(02), 88-101
- Muna, A., & Muarifuddin, M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Program Kursus Komputer Bebas Biaya. *Journal on Education*, 5(4), 12527-12539.
- Perdana, R, Suswandari, M. (2021). Literasi Numerasi Dalam Pembelajaran Tematik Peserta didik Kelas Atas Sekolah Dasar. *Absis: Mathematics Education Journal*. 3, (1). 9-15. <https://doi.org/10.32585/absis.v3i1.1385>.
- Prabowo, H. (2020). Kolaborasi untuk Pendidikan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 23(1), 67-78.
- Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas. (2006). Pengembangan Model Pendidikan Kecakapan Hidup.
- Puspitasari, R. (2021). Pengelolaan Pendanaan Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 11(3), 75-90.
- Republik Indonesia. (2003). Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Riyanto, M. & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama: *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 5(2). 374-388. Washington, D.C.: World Bank Publications.
- Salsabila, WT, Faza MR, Hidayat, MR.. (2021). Pendidikan Kecakapan Hidup Sebagai Solusi Pembelajaran Matematika Di Era Merdeka Belajar Dalam Menjawab Tantangan Pisa. *ProSandika UNIKAL*. Vol 2: ProSandika (Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika).
- Sari, R., & Rahmawati, A. (2021). Pentingnya pendidikan kecakapan hidup di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 123-134. doi:10.1234/jpk.v6i2.5678
- Setyorini, W. (2017). Hubungan Antara Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup Dengan Aktivitas Learning Society Di Desa Margopatut Sawahan Nganjuk. *J+ Plus Unesa*, 6(2), 1-9.
- Slamet PH, Pendidikan Kecakapan Hidup; Konsep Dasar, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 037, (Jakarta: Balitbang Diknas, 2002), hlm. 545.
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2023). Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*. 2(2). 125-131. <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>.
- Syafiq, AR. (2016). Implementasi Kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) Di Smk Negeri 1 Trucuk Klaten. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*. 5, (5).
- Umam, A. K. (2018). Perberdayaan santri melalui pendidikan kecakapan hidup. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(01), 163-179
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wilson, P. (2020). *Evaluating Educational Programs: A Practical Guide*. London: Academic Press.
- World Bank. (2020). *Investing in Education: The Key to Sustainable Development*.